

BAB V

KESIMPULAN

Pihak AS mendukung resolusi PBB tentang kemerdekaan Libya pada tahun 1951 dan menaikkan status kantor perwakilannya di Tripoli dari Konsulat Jenderal menjadi Kedutaan Besar. Dan Libya membuka kantor kedutaannya di Washington DC pada tahun 1954.

Tapi setelah terjadinya kudeta oleh Qadhafi, hubungan AS-Libya menjadi tegang karena politik luar negeri Libya era pemerintahan baru yang cenderung mendukung terorisme internasional dan subversif melawan negara Arab yang moderat dan negara-negara Afrika lainnya. Pada tahun 1972, pemerintah AS menutup kedutaannya di Tripoli. Kontrol terhadap ekspor peralatan militer dan penerbangan sipil diperketat selama tahun 1970-an, staf kedutaan juga ditarik dari Tripoli. Dan pemerintah AS secara resmi mengumumkan Libya sebagai “Negara sponsor terorisme” pada tanggal 29 Desember 1979.

Selama beberapa tahun ke depan hubungan kedua negara semakin memburuk dan mencapai titik terendah. Latihan perang pasukan AS kadang sengaja dilakukan di perairan Mediterania yang diklaim merupakan milik Libya. Sehingga tembak-menembak antara keduanya tidak dapat dihindari. Dan pada Desember 1981, pemerintah AS melarang warganya untuk bepergian ke Libya, dan menarik pulang semua warganya yang tinggal di Libya. Pada tahun 1986, AS secara resmi memberikan sanksi ekonomi kepada Libya, termasuk pelarangan impor dan ekspor langsung, kontrak komersial, dan pelarangan berurusan ke

Libya. Aset pemerintah Libya yang ada di AS dibekukan. Dan sejak saat itu AS bertahan pada kebijakan embargo ekonominya sebagai tekanan pada Libya untuk mengubah kebijakannya.

Keadaan Libya semakin tertekan ketika pada tahun 1992 PBB mengenai sanksi ekonomi pada Libya. Melalui *Iran-Libyan Sanction Act* yang melarang perusahaan minyak non-AS untuk beroperasi di Libya. Hal ini merupakan pukulan berat bagi perekonomian Libya, karena selama ini Libya sangat bergantung pada hasil produksi minyaknya. Minyak telah membuat Libya menjadi negara terkaya di Afrika. Dan dari minyak jugalah ambisi Qadhafi untuk memiliki angkatan bersenjata yang besar dapat terlaksana. Sehingga dengan adanya sanksi PBB ini, Libya menjadi kehilangan partner dagang dan akses teknologi. Pembangunan infrastruktur masyarakat yang sedang gencar-gencarnya dilakukan menjadi terhenti.

Perubahan terjadi pada tahun 2003, ketika pemerintah Libya bersedia membayar kompensasi pada keluarga korban Lockerby dan Libya juga bersedia bertanggung jawab atas pembayaran kompensasi keluarga korban pengeboman pesawat UTA milik Perancis yang meledak di atas udara Afrika pada tahun 1989.

Tanda-tanda positif lainnya terjadi pada akhir tahun 2003, ketika Qadhafi mengakui keberadaan program WMD dan bersedia untuk menghentikan program tersebut. Dan sejak saat itu hubungan antara Libya-AS perlahan membaik. Pada Februari 2004, Kedubes AS di Tripoli kembali di buka.

Ternyata keputusan Libya untuk mengambil kebijakan normalisasi didukung oleh faktor-faktor antara lain:

1. Perubahan politik dalam negeri Libya. Dimana mulai muncul kembali organisasi-organisasi yang menyuarakan perubahan situasi. Dalam hal ini mereka menginginkan keterbukaan terhadap barat. Salah satu organisasi itu adalah Qadhafi Foundation for Charitable Organization, yang dipelopori oleh putra Qadhafi sendiri yaitu Seif al Islam al Qadhafi, yang mempunyai andil besar dalam membujuk ayahnya untuk membayar kompensasi kepada keluarga korban pengeboman pesawat Pan Am 103 dan UTA dengan jumlah yang layak.
2. Keadaan ekonomi dan militer Libya. Kemunduran ekonomi yang dialami Libya semenjak dikenai sanksi ekonomi oleh PBB tahun 1992. Membuat keresahan sosial di dalam negeri menjadi semakin kuat. Dan Qadhafi merasa bahwa apabila dia tidak memperbaiki keadaan ekonominya maka ancaman kudeta terhadap rezimnya oleh rakyat sipil bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Sehingga sebagai langkah awal untuk memperbaiki perekonomiannya Qadhafi memutuskan untuk membuka kembali hubungan dengan Barat dan memenuhi semua tuntutan dunia internasional, dengan harapan bahwa perusahaan asing akan kembali berinvestasi di Libya, dan roda ekonomi Libya akan kembali berjalan. Dalam hal ini yang menjadi andalan utama Libya adalah industri perminyakan yang sempat menjadikan Libya Negara

3. Kejadian-kejadian internasional yang terjadi pada beberapa tahun terakhir tampaknya juga mempengaruhi cara pandang Qadhafi terhadap dunia internasional. Beberapa kejadian itu antara lain: (1) invasi AS ke Iraq dengan dalih pemberantasan terorisme internasional, membuat Qadhafi berfikir bahwa hal yang sama juga akan terjadi pada dirinya. Karena nota bene Libya merupakan salah satu Negara yang termasuk dalam daftar Negara penyokong terorisme dalam catatan AS bersama dengan Irak, Iran dan Korea Utara. Sehingga hal ini membuat Amerika mempunyai alasan untuk menginvasi AS apabila mereka tidak bersedia bekerjasama dengan AS. (2) desakan dari pihak Italia membuat Uni Eropa harus segera mencabut embargo ekonominya terhadap Libya. Hal ini berkaitan dengan masalah imigran gelap yang selama ini dihadapi oleh Italia. Sebagian besar imigran ini berasal dari Afrika Utara yang datang melalui laut Mediterania. Pihak Italia menginginkan agar Libya lebih memperketat penjagaan di perbatasan lautnya dan menangkap para imigran ini. Selain itu desakan juga datang dari perusahaan minyak Eropa yang selama ini beroperasi di Libya. Hal ini berkaitan dengan kelancaran suplai minyak ke Eropa karena permintaan masyarakat dan industri yang semakin meningkat. Sehingga eksplorasi dan investasi minyak di Libya merupakan jalan keluar terbaik untuk masalah ini.

Normalisasi antara kedua negara tertulis secara resmi dalam sebuah

perjanjian intergovernmental yang ditandatangani oleh kedua pemimpin negara

yang ditandatangani sejak tanggal 25 Januari 2005. Normalisasi kedua negara terlihat dalam wujud-wujud yang nyata. Misalnya kembali dibukanya kantor perwakilan pemerintah AS di Tripoli. Dan dalam waktu dekat pihak Libya juga akan kembali mengaktifkan Biro luar negerinya yang ada di Washington D.C. Normalisasi ini berpijak pada rasa kepercayaan kedua belah pihak bahwa akan ada bentuk hubungan yang lebih membangun dan menguntungkan bagi mereka. Dan tentunya hal ini juga dibarengi dengan sikap Libya yang sangat kooperatif dan bersedia untuk memenuhi tuntutan-tuntutan AS yang diajukan kepadanya. Dan puncaknya adalah dicabutnya secara resmi sanksi ekonomi AS terhadap Libya, yang berarti semua aktifitas ekonomi dan non-ekonomi dapat kembali berjalan antara kedua negara.

Bagi Libya sendiri normalisasi ini berarti kembalinya identitas diri sebagai negara yang diakui oleh dunia internasional dan kembali ikut dalam aktifitas dunia internasional, tanpa ada embel-embel negara teroris, negara terkucil dan sebagainya. Libya sekarang mulai berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan internasional yang dilaksanakan oleh organisasi internasional seperti PBB. Misalnya partisipasi Libya dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh IAEA, tentang Prohibition of chemical Weapon dan Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation. Partisipasinya dalam hal ini bukan sebagai negara pariah tetapi sebagai partner murni yang mengejar tujuan yang sama dengan organisasi ini. Selain itu Amerika juga berjanji untuk memberikan bantuan pada Libya berupa asistensi Amerika dalam usaha Libya untuk maju dan

memodernisasikan Libya dan pembangunan kembali di bidang ilmu pengetahuan dan industri kesehatan.

Selama penulisan skripsi ini banyak hal baru dan pengetahuan-pengathuan baru yang penulis temui. Khususnya dalam penerapan teori-teori politik yang selama ini penulis dapati selama perkuliahan. Mata kuliah seperti Metode Ilmu Politik, Politik dan Pemerintahan Timur Tengah, dan Analisa Hubungan Internasional adalah sedikit dari mata kuliah yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dan penulis berharap bahwa skripsi ini nantinya dapat digunakan sebagai salah atu referensi dalam memajukan ilmu hubungan internasional di masa yang akan datang.

Setelah penulis menganalisa permasalahan normalisasi Libya-AS ini penulis mendapatkan bahwa ternyata keputusan kontroversi yang diambil oleh seorang *decision maker* apa pun bentuknya itu merupakan salah satu usaha untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Contohnya keputusan Qadhafi untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Barat bagi sebagian pihak dianggap sebagai keputusan yang plin plan dan tidak konsisten. Tapi apabila kita memandang nya dari sudut pandang Libya maka keputusan ini malah menunjukkan ke-konsisten-an Libya dalam menjaga tercapainya kepentingan nasionalnya. Kebijakan normalisasi menjadi pilihan yang paling rasional yang dapat menyelamatkan keutuhan dan kedaulatan Libya.

Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan menjadi sumbangan kepada pengembangan ilmu hubungan internasional. Dan dapat menjadi salah satu referensi dalam mata kuliah Politik dan Pemerintahan